



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024**

INSPEKTORAT DAERAH

KATA PENGANTAR

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

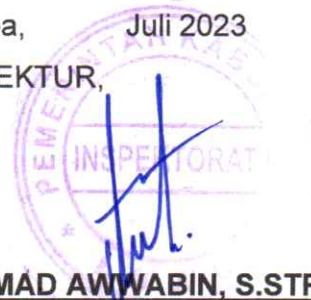
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Inspektorat dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat kebijakan, Program-program dan Kegiatan Indikatif Inspektorat selama kurun waktu Satu Tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Tersusunnya Rencana Kerja ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu, besar harapan kami agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat .

Akhirnya untuk melengkapi kekurangan Rencana Kerja (RENJA) ini, saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan dalam penyempurnaan Renja ini.

Belopa, Juli 2023

INSPEKTUR,



ACHMAD AWWABIN, S.STP,M.Si

PKT. Pembina Utama Muda

NIP. 197801281996121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar belakang	2
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 & Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat	22
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024	25
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	30
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024	31
3.3 Program dan Kegiatan	35
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	38
BAB V Penutup	49
4.1 Kaidah Pelaksanaan	
4.2 Rencana Tindaklanjut	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d 2022 (Tahun Berjalan) Kabupaten Luwu	10
Tabel 2.	Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu	15
Tabel 3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Luwu	24
Tabel 4.	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu	33
Tabel 5.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024	38

BAB I

PENDAHULUAN

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra–PD) Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah dan selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan yaitu untuk tahun 2024. Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Susunan Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi tersebut, maka dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis periode 2019-2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu, sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugasnya sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauhmana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis, sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1 LATAR BELAKANG

Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis periode 2019-2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan bagi inspektorat.

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang, sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan program dan kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/7326/SJ Tahun 2019 tentang Prioritas Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabuapten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
30. Peraturan Bupati Luwu Nomor 125 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu;
31. Peraturan Bupati Luwu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Luwu Nomor 122 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, jabatan dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Luwu;
32. Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 Kabupaten Luwu.

33. Peraturan Bupati Luwu Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA dan penetapan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu serta tolak ukur pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama organisasi yang akan dicapai setiap tahunnya guna mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 bertujuan untuk mendorong terwujudnya sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antar sektor-sektor pembangunan dan diharapkan Renja dapat menjadi kerangka dasar Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan serta mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan di Tahun 2024 dapat tercapai.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini, memuat program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 diuraikan secara singkat dalam masing-masing Bab adalah sebagai berikut :

Bab I :Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II :Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2022
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat

Bab V : Penutup

- 4.1 Kaidah Pelaksanaan
- 4.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 & Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja (renja) Inspektorat Daerah Tahun 2022. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Inspektorat di-tujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Inspektorat, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator - indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah capainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam evaluasi pelaksanaan Target Kinerja capaian Program Renja Tahun 2024 disusun mengacu pada dokumen rencana strategis periode 2019-2024, yang nomenklatur program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan Visi dan Misi

Kepala Daerah terpilih dan mandatori Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 akan muncul penambahan kegiatan dan juga indikator kinerja tahun 2024.

Alokasi anggaran program dan kegiatan prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 9.304.936.090 telah terealisasi sebesar Rp. 9.206.852.298 atau 98.95%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan dilakukan melalui 7 (Tujuh) kegiatan dengan jumlah dana Rp. 5.657.092.350 dan realisasi anggaran Rp.5.557.636.540 atau 98.24%, meliputi :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 112.516.000 terealisasi sebesar Rp. 111.442.337 atau 99.05%. Pada tahun 2022 Sub. kegiatan yang dilaksanakan seperti Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dukumen DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 4.332.304.973 terealisasi sebesar Rp.4.314.444.662 atau 99.59%. Pada tahun 2022 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan/Semesteran SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah dengan anggaran Rp. 12.000.000 terealisasi sebesar Rp.12.000.000 atau 100.00%. Pada tahun 2022 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 217.055.000 terealisasi sebesar Rp.214.413.880 atau 98.78%. Pada

tahun 2022 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 406.119.050 terealisasi sebesar Rp.367.602.973 atau 90.52%. Pada tahun 2022 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan/ Material, Fasilitas kunjungan Tamu dan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 335.100.000 terealisasi sebesar Rp.317.175.280 atau 94.65%. Pada tahun 2022 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik dan Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 241.997.327 terealisasi sebesar Rp.220.557.408 atau 91.14%. Pada tahun 2022 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan dilakukan melalui 2 (Dua) kegiatan prioritas dengan jumlah dana Rp. 3.310.108.600 dan realisasi anggaran Rp.3.294.728.306 atau 99.54%, meliputi :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan anggaran Rp. 1.521.324.500 terealisasi sebesar Rp. 1.516.608.302 atau 99.69%. Pada tahun 2022 Sub. kegiatan yang dilaksanakan seperti Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Desa, Kerjasama Pengawasan Internal dan Monitoring, Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan anggaran Rp. 1.788.784.100 terealisasi sebesar Rp.1.778.174.000 atau 99,41%. Pada tahun 2022 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dilakukan melalui 2 (Dua) kegiatan prioritas dengan jumlah dana Rp. 337.735.140 dan realisasi anggaran Rp. 345.433.452 atau 104.94 %, meliputi:

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan anggaran Rp. 39.009.250 terealisasi sebesar Rp. 38.765.000 atau 99.37 %. Pada tahun 2022 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan.
- b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan anggaran Rp. 298.725.890 terealisasi sebesar Rp. 315.668.452 atau 105.67 %. Pada tahun 2022 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

.Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2023 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Pencapaian kinerja Tahun 2022 serta perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2023 sudah dapat dikaitkan dengan pencapaian target tahunan dalam rencana Strategis Inspektorat Periode 2019-2024, dikarenakan Rencana Kerja Tahun 2023 masih dalam tahun berjalan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. **Program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah:**

- ❖ Tidak terdapat Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
- b. Program/ kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran adalah :**
 - ❖ Program Penyelenggaraan Pengawasan dalam hal ini terdapat pada Kegiatan :
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - ❖ Program Perumusan Kebijakan, Asistensi dan Pendampingan dalam hal ini terdapat pada :
 - Kegiatan Pendampingan Asistensi
- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA Inspektorat adalah :**

Tidak terdapat kegiatan dalam program renstra yang masih belum terpenuhi.

Tabel T-C. 29.
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8=7/6x100			9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah	100,00	31.361.616.573	100	5.657.092.350	100,00	5.557.636.540	100,00		98,24	Inspektorat
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	276.974.780	100	112.516.000	100,00	111.442.337	100,00		99,05	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	9	119.311.350	2	63.209.400	2,00	62.978.337	100,00		99,63	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	4	44.988.810	1	9.458.400	1,00	9.431.000	100,00		99,71	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8=7/6x100		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	4	28.471.830	1	8,994,450	1,00	8,586,000	100,00	95,46	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	4	28.928.530	1	7,228,400	1,00	7,191,000	100,00	99,48	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	4	27.302.830	1	7,952,800	1,00	7,720,000	100,00	97,07	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	20	27.971.430	4	15,672,550	2,00	15,536,000	100,00	99,13	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan secara tepat waktu	100,00	22.500.028.508	100	4,332,304,973	100,00	4,314,444,662	100,00	99,59	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	2.436	21.741.088.088	43	4,126,649,373	43,00	4,109,989,662	100,00	99,60	
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	445	701.270.000	12	179,930,000	12	179,150,000	100	99,57	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6			7			8=7/6x100			9
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	4	30.335.840	1	9.817.800	1	9.560.000	100.00	97.37					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	8	27.354.600	2	15.907.800	2.00	3.920.000	100.00	98.98					
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada PD	100,00	50.905.266	100	12.000.000	100.00	12.000.000	100.00	100.00					
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	16	50.905.266	4	12.000.000	100.00	12.000.000	100.00	100.00					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	2.185.867.400	100	217.055.000	75.00	214.413.880	75.00	98.78					
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	152	1.585.955.000	43	217.055.000	75.00	214.413.880	75.00	98.78					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	100,00	2.114.198.825	100	406.119.050	100.00	367.602.973	100.00	90.52					

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8=7/6x100			9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	415	43.551.400	9	9.319.000	9,00	9.299.500	100,00	99,79		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	38	189.175.625	41	34.216.500	36,00	33.337.000	87,80	97,43		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan	2.072	109.037.400	20	11.421.650	20,00	11.383.000	100,00	99,66		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistic kantor dalam 1 (satu) tahun	48	78.975.000	12	15.947.400	12,00	15.925.500	100,00	99,86		
		Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	48	55.453.000	12	10.510.000	12,00	10.470.000	100,00	99,62		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	48	200.000.000	500	49.000.000	500,00	46.440.000	100,00	94,78		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	48	216.594.900	12	38.335.750	12,00	37.817.000	100,00	98,65		

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8=7/6x100			9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	
		Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	6.348	221.660.000	130	14.000.000	130	13.975.000	100.00		99.82	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah	344	999.751.500	43	223.368.750	34.00	188.955.973	84.59		84.59	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penuhannya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	85,09	1.136.347.441	52.90	-	52.90	-	0.00		0.00	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Beutbeleur yang diadakan	37	197.460.000	1	-	-	-	0.00		0.00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	2.165.038.140	100	335.100.000	100.00	317.175.280	100.00		94.65	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	48	770.788.140	12	93.000.000	12.00	84.175.280	100.00		90.51	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1416	1.394.250.000	35	242.100.000	35.00	233.000.000	100.00		96.24	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8=7/6x100		9			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	932.256.213	100	241.997.327	75,00	220.557.408	100,00	91.14			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan pertzinan	Unit	188	624.436.625	47	82.390.883	47,00	72.630.408	100,00	88.15			
		Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	Unit/Set	212	82.530.000	53	11.360.000	42,00	11.140.000	100,00	98.06			
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Bangunan Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	M2	1.200	225.289.588	300	148.246.444	2,00	136.787.000	100,00	92.27			
				Rata-rata capaian kinerja (%)									96.47	94.06	
				Predikat kinerja											
2.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindaklanjut Temuan Inspektorat Kabupaten	%	90,00	12.351.683.200	90	3.310.108.600	85,00	3.294.782.306	94.44	99.54			

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8=7/6x100		9
Pemerintahan Daerah			Persentase Tindaklanjut Temuan BPK	85,00		85						
			Persentase Tindaklanjut Temuan BPKP	90,00		90						
			Persentase Tindaklanjut Temuan Inspektorat Provinsi	90,00		90						
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00		100						
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	300	7.986.827.600	75	1.521.324.500	90,00	1.516.608.306	100,00	99,69	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	122	3.274.655.600	32	492.815.100	35,00	491.111.045	100,00	99,6	
			Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	76	605.700.000	16	698.539.800	18,00	695.254.024	100,00	99,67	
			Revisi Laporan Kinerja	20	602.000.000	5	53.400.000	5,00	53.260.000	100,00	99,74	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5		6		7		8=7/6x100	K	Rp	9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang direviu	12	1.049.200.000	3	8.070.000	1,00	7.880.000	90,00	97,65			
		Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pemeriksaan keuangan desa	72	1.358.752.800	18	134.938.200	18,00	134.795.000	90,00	99,89			
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil kerjasama pengawasan	12	297.782.800	3	32.300.000	3,00	32.300.000	90,00	100,00			
		Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan APFP yang sudah ditindaklanjuti	80	798.736.400	20	101.216.400	20,00	101.008.237	60,00	99,75			
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan tertentu	228	4.364.855.600	57	1.788.784.100	90,00	1.778.174.000	96,49	99,41			
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah tertuntut yang melakukan pengembalian kerugian negara	80	1.493.607.400	20	310.378.450	20,00	302.743.000	90,00	97,54			
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	148	2.871.248.200	37	1.478.405.650	36,00	1.475.431.000	100,00	99,80			
Rata-rata capaian kinerja (%)											92,41	99,34		
Predikat kinerja														

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8=7/6x100		9
3.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Ketersediaan Kebijakan di bidang pengawasan dan penyelenggaraan pendampingan dan Asistensi	100,00	3.833.234.360	100	337.735.140	75,00	312.412.820	100,00	104,94	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan teknis dibidang pengawasan yang dirumuskan	8	153.357.000	2	39.009.250	75,00	38.765.000	100,00	99,37	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen Kebijakan teknis di bidang Pengawasan yang dirumuskan	24	78.557.000	6	39.009.250	1,00	38.765.000	100,00	99,37	
		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Objek Pembinaan yang dilakukan Pendampingan dan asistensi	20,00	3.679.877.360	20,00	298.725.890	85,00	315.668.452	50,00	105,67	
		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	20	339.054.000	5	53.823.000	5,00	53.690.000	100,00	99,75	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6			7			8=7/6x100			9
		Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	4	264.559.160	1	30.852.290	1,00	30.575.500	100,00	99,10					
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan	140	1.283.893.000	1	150.439.400	1,00	168.015.952	90,00	111,68					
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan pendampingan, asisten dan verifikasi penegakan integritas	4	1.792.371.200	1	63.611.200	1,00	63.387.000	90,00	99,65					
Rata-rata capaian kinerja (%)														90,00	102,09	
Predikat kinerja																
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM																
							9,304,936,090		9,206,852,298		98,95					

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Sesuai dengan Dokumen RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu sesuai dengan Renstra tertuang dalam capaian Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel T-C. 30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu

No	Indikator	Target RENSTRA				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2021 (n-3)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	
1	Predikat penilaian implementasi SAKIP Oleh Inspektorat Kabupaten	B	BB	BB	BB	B	BB	BB	
2	Persentase pemenuhan Auditor dan P2UPD Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu	64,44	73,33	82,22	91,11	64,44	82,22	91,11	
3	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Hasil Evaluasi Perwakilan BPKP Prov. Sulsel
4	Level maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Luwu	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Hasil Evaluasi Perwakilan BPKP Prov. Sulsel
5	Rata-rata predikat penilaian implementasi SAKIP seluruh Perangkat Daerah	B	B	B	BB	B	B	BB	
6	Implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM	4	8	12	16	4	12	16	
7	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan berbasis elektronik	2	4	7	9	2	7	9	
8	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	95,45%	100%	100%	
9	Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Kabupaten	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	85%	85%	85%	85%	82,30%	85%	85%	
	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPKP	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	

No	Indikator	Target RENSTRA				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2021 (n-3)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Cakupan Ketersediaan Kebijakan di bidang pengawasan dan penyelenggaraan pendampingan dan Asistensi	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, Yaitu :

a. Faktor Pendorong :

- Adanya dokumen Renstra Inspektorat Daerah yang disusun dengan baik dan selaras dengan pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD.
- Tingkat pendidikan sebagian besar PNS dilingkungan Inspektorat Daerah yang memenuhi syarat untuk ditingkatkan kompetensinya.
- Adanya standar baku mutu atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah.

Rumusan penjelasan visi, rumusan misi, dan program kerja tersebut di atas merupakan tanggung jawab Inspektorat Daerah

b. Faktor Penghambat :

- Kesadaran aparatur sebagai agen perubahan masih rendah sehingga cenderung pragmatis, kurang disiplin dan lambat dalam transformasi menuju aparatur yang profesional, inovatif dan responsif.
- Untuk membentuk kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah, dibutuhkan komitmen dan investasi yang berkelanjutan. Khusus untuk Inspektorat Daerah, anggaran yang disediakan selama ini belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga sulit menjadi perangkat daerah yang dapat dijadikan contoh dalam kapasitas dan profesionalisme aparatur.

- Aparatur yang memiliki kompetensi masih kurang, khususnya dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Hal ini menyebabkan aparatur Inspektorat Daerah, khususnya P2UPD kurang mampu melihat hubungan antara output, benefit, hasil dan dampak dari suatu kegiatan terhadap sasaran dan tujuan pembangunan, sehingga rekomendasi yang disampaikan tidak menjadikan aparatur perangkat daerah yang diperiksa dan diawasi menjadi lebih baik dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi suatu kegiatan.
- Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah yang merupakan tugas pokok Inspektorat Daerah sulit ditingkatkan tanpa ketersediaan aparatur sesuai standar dan anggaran sesuai kebutuhan.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu :

1. Kapasitas Kelembagaan Masih Lemah

Kapasitas kelembagaan dimaknai sebagai volume/kekuatan perangkat daerah dari aspek jumlah pegawai, jumlah anggaran, maupun ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran. Akar masalah yang terpenting dari permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya aparatur yang memiliki kompetensi pendidikan sesuai dengan Daftar Materi Pemeriksaan (DMP).
- b. Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan.
- c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif.
- d. Anggaran Inspektorat Daerah belum mencapai 0,75% dari total belanja daerah atau masih kurang dari 10 miliar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBD.

2. Kapabilitas Kelembagaan Belum Optimal

Kapabilitas kelembagaan dimaknai sebagai kemampuan perangkat daerah menggerakkan organisasi dari aspek profesionalisme/kompetensi aparatur, kebijakan/sistem yang diterapkan, maupun ketersediaan sarana-prasarana pendukung pelaksanaan tugas, berupa aset berwujud maupun tidak berwujud. Akar masalah yang terpenting dari permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan berupa seperangkat sistem yang dapat digunakan untuk mempermudah pengelolaan data dan pelaporan.
- b. Masih kurangnya jatah diklat kompetensi khusus dari instansi pembina (BPKP untuk Auditor dan Kemendagri untuk P2UPD).
- c. Masih ada instrumen/SOP pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum tersedia, misalnya petunjuk teknis dalam melakukan rewiu rencana perangkat daerah

maupun implementasi SAKIP perangkat daerah.

- d. Masih belum memadainya sarana mobilitas maupun pendukung pelaksanaan pengawasan lainnya, seperti kendaraan operasional dan peralatan ukur/uji tertentu.

3. Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Belum Efektif

Pengawasan yang efektif seharusnya memberikan perubahan bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain meningkatnya tata kelola, kompetensi aparatur maupun paradigma terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang berorientasi kepada hasil yang dicapai. Namun pada kenyataannya, berbagai kondisi yang terkait dengan hal tersebut di atas, belum terlihat perubahan sebagaimana yang diharapkan, perangkat daerah cenderung enggan atau lambat bertransformasi menuju birokrasi yang profesional, akuntabel dan inovatif. Akar masalah yang terpenting dari permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Fungsi pembinaan pada tahap perencanaan belum dilakukan secara optimal. Hal ini menyebabkan rencana perangkat daerah belum selaras dengan rencana pembangunan daerah, belum menggambarkan potensi dan permasalahan yang ada, kurang terukur dan berkelanjutan dalam pencapaian target pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Selain itu, proses yang belum optimal tersebut menyebabkan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja belum dapat dilakukan secara optimal dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu. Selanjutnya, kondisi ini mempersulit pelaksanaan fungsi pengawasan mengingat arsitektur kinerja maupun tujuan dan sasaran perangkat daerah tidak terlihat dalam dokumen dan kurang dimengerti oleh aparatur pengawas.
- b. Inspektorat Daerah belum maksimal dalam memanfaatkan seluruh potensi untuk melakukan pengawasan. Kekurangan personil untuk melakukan fungsi pengawasan seharusnya dapat diminimalkan dengan melibatkan seluruh aparatur yang ada dalam pengawasan. Selama ini yang berperan dalam pengawasan adalah auditor dan P2UPD, sedangkan aparatur lainnya belum dilibatkan secara maksimal. Oleh karena itu, perlu diberikan pelatihan

secukupnya agar seluruh aparaturnya yang ada dapat terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan.

- c. Penerapan metode *Current Issue*, *Check and Balances* dan *Clearing House* masih kurang dan belum berkesinambungan. Disamping mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, beberapa strategi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dapat dilakukan, yaitu proaktif terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat (*current issue*), menguji kebenaran terhadap isu yang berkembang (*check and balances*), dan menjembatani persoalan yang dihadapi perangkat daerah dengan BPK/BPKP/Inspektorat Daerah Provinsi maupun masyarakat.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan untuk fasilitasi pendidikan dan latihan bagi Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk:
 - a. Peningkatan Kapabilitas APIP.
 - b. Peningkatan Maturitas SPIP.
 - c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis
 - d. Perumusan regulasi kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
 - e. Meningkatkan system teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan pengawasan internal.
4. Merumuskan ratio kebutuhan SDM pemeriksa sesuai dengan kompetensi pendidikan dan daftar materi pengawasan (DMP)
5. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.
6. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan misi Bupati Luwu serta visi dan misi Inspektorat khususnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu tahun 2024 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2024 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2024 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Luwu.

Berikut ini adalah tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024:

Tabel T-C. 3.1.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Luwu
Nama Perangkat Daerah : *Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan	
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Kabupaten		90 %	<u>3.804.860.000</u>	90%	<u>3.812.752.800</u>
		Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK		85 %			
		Persentase Tindak Lanjut Temuan BPKP		90 %			
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi		90 %			
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti		100 %			
2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	Belopa	75 Laporan	<u>2.565.121.100</u>	75 Laporan	<u>2.565.121.100</u>
	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Belopa	30 LHP	733.355.400	30 LHP	733.355.400
	2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan pemerintah Daerah	Belopa	20 Laporan	256.493.800	20 Laporan	256.493.800
	3. Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja yang direviu	Belopa	5 Laporan	165.488.400	5 Laporan	165.488.400
	4. Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang direviu	Belopa	3 Laporan	395.001.200	3 Laporan	395.001.200
	5. Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan		18 Laporan	834.988.200	18 Laporan	834.988.200

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan	
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		<i>Keuangan Desa</i>	Belopa				
	6. Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Kerjasama Pengawasan	Belopa	3 Laporan	38.945.700	3 Laporan	38.945.700
	7. Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan APJP yang sudah ditindaklanjuti	Belopa	20 Temuan	140.848.400	20 Temuan	140.848.400
2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tertentu</i>	Belopa	57 Laporan	<u>1.239.738.900</u>	57 Laporan	<u>1.247.634.700</u>
	1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah tertuntut yang melakukan pengembalian kerugian daerah	Belopa	20 Orang	299.001.850	20 Orang	373.401.850
	2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Belopa	37 Laporan	940.737.050	37 Laporan	874.232.850
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Capaian Target Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Belopa	100 %	<u>670.831.740</u>	100 %	<u>686.987.890</u>
03.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan	Belopa	2 Kebijakan	<u>35.988.650</u>	2 Kebijakan	<u>35.988.650</u>
	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan	Belopa	6 Dokumen	35.988.650	6 Dokumen	35.988.650
03.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Objek Pembinaan yang dilakukan Pendampingan dan	Belopa	20 %	<u>634.843.090</u>	20 %	<u>650.999.240</u>

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan	
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Asistensi					
1.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Belopa	5 Laporan	241.595.000	5 Laporan	135.902.300
2.	Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Belopa	1 Laporan	62.102.290	1 Laporan	66.137.090
3.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi yang dilaksanakan	Belopa	35 PD	279.884.600	35 PD	370.052.350
4.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Belopa	1 Laporan	51.261.200	1 Laporan	78.907.500

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan pemerintahan, Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu tetap harus mengawal proses perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dan pada tahap musyawarah perencanaan pembangunan dengan agenda menyerap aspirasi Masyarakat, sekalipun tidak ada usulan ataupun permintaan sehingga penyusunan Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Luwu tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM serta organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Luwu belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholders sehingga penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu tetap mengacu pada dokumen Rencana Strategis dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun uraian kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, meliputi :
 - a. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan, dan barang/asset terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Review Rencana Kerja Anggaran;
 - c. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian / Inspektorat Utama / Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
 - h. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - i. Pendampingan, asistensi, fasilitasi;
 - j. Pengawasan atas Tugas Pembantuan; dan
 - k. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.

2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik, meliputi :
 - a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - 2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - 3) Pembangunan zona integritas;
 - 4) Pengendalian gratifikasi;
 - 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 6) Penanganan pengaduan masyarakat;
 - 7) Penguatan Whistle Blowing System;
 - 8) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - 9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 - a. Pemantauan pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
 - b. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
 - a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - c. Koordinasi program pengawasan;
 - d. Tugas lain sesuai kebijakan kepala daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan effort dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang

diperoleh dari pencapaian hasil(outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah dimasa mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut,seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 merujuk pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Rencana Kerja Strategis Tahun 2019 – 2024. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu sebagai berikut :

Tabel.3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu

No	MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mewujudkan pemerintahan yang profesionalisme, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel	Mewujudkan pengawasan intern pemerintah yang profesional dan independen		Persentase temuan hasil pengawasan APFP dan laporan pengaduan yang ditindaklanjuti	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
				Predikat penilaian implementasi SAKIP Oleh Inspektorat Kabupaten	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Auditor dan P2UPD Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu	64,44	64,44	64,44	73,33	82,22	91,11	91,11	91,11
				Level kapabilitas APIP	Level 2	Level 2,72	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

No	MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Luwu	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
				Rata-rata predikat penilaian implementasi SAKIP seluruh Perangkat Daerah	CC	CC	B	B	B	BB	BB	
			Meningkatnya kualitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM	0	0	4	8	12	16	0	
				Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan berbasis elektronik	1	1	2	4	7	9	9	

3.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan menggunakan nomenklatur yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk mengetahui keterkaitan antar komponen rencana pembangunan sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2024 menetapkan 3 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan dan 42 sub. kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1). Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- *Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerang Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Bahan/ Material
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1). Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Reviu Laporan Kinerja
- Reviu Laporan Keuangan
- Pengawasan Desa
- Kerjasama Pengawasan Internal
- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2). Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

1). Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

2). Pendampingan dan Asistensi

- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Inspektorat Kabupaten Luwu dalam menjalankan program dan kegiatan Tahun 2024 anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak (PBHP). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk merencanakan program/kegiatan. Pagu indikatif Perangkat Daerah adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja (APBD) untuk merencanakan program/kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan RPJMD/Renstra/Renja Perangkat Daerah (*Top Down Planning*) yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratis Perangkat Daerah dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan	Perangkat Daerah							4.993.138.508				5.333.604.224
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen administrasi keuangan	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	100 %	45 Orang /bulan	100 %	4.727.286.451	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	5.085.360.014
6 01 01 2.02 03	Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen administrasi keuangan	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	100 %	113 Orang/ Bulan	100 %	242.172.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	229.260.000
6 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	Persentase dokumen administrasi keuangan	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	100 %	1 Laporan	100 %	11.816.988	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	8.965.210
6 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase dokumen administrasi keuangan	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	100 %	2 Laporan	100 %	11.862.569	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	10.019.000
6 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah	Perangkat Daerah							12.603.103				12.833.206
6 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	100 %	4 Laporan	100 %	12.603.103	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	12.833.206
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian	Perangkat Daerah							576.493.500				532.568.000

Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Jumlah ASN dengan kinerja baik	Kab. Luwu, Belopa, Tampulia Radda	100 %	45 Orang	100 %	576.493.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	493.568.000
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								728.490.828					851.046.600
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampulia Radda	100 %	9 jenis	100 %	10.955.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	11.502.100
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampulia Radda	100 %	22 Jenis	100 %	250.164.030	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	252.853.800
6 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampulia Radda	100 %	20 jenis	100 %	40.087.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	28.048.100
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampulia Radda	100 %	12 Bulan	100 %	27.377.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	26.325.000
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang, Cerakan dan Penggandaan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cerakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampulia Radda	100 %	12 Bulan	100 %	14.286.640	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	14.290.000
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampulia Radda	100 %	12 Bulan	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah	100 %	50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target	
6 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	100 %	12 Bulan	100 %		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	57,127,600
6 01 01 2.06 08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kunjungan tamu yang difasilitasi	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	100 %	100 Orang/ Kegiatan	100 %		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	55,415,000
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan/dilikuti	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	100 %	43 Orang/ke	100 %		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	355,485,000
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											557,940,000
6 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	100 %	5 Unit	64,15 %		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	525,690,000
6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	100 %	10 Unit	64,15 %		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	32,250,000
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											444,110,400
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	Persentase ketersediaan jasa penunjang	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	100 %	12 Bulan	100 %		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	117,710,400

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur
6 01 01 2.08 04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan jasa penunjang	100 %	23 Orang/Bulan	Kab. Luwu, Belopa, Tampunua Radda	309.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
6 01 01 2.09 02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	47 Unit	Kab. Luwu, Belopa, Tampunua Radda	141.641.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	53 Unit	Kab. Luwu, Belopa, Tampunua Radda	26.850.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	1 Unit	Kab. Luwu, Belopa, Tampunua Radda	67.351.440	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN											
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal											
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	100 %	30 LHP	Kab. Luwu, Belopa, Tampunua Radda	745.098.898	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	
		Persentase tindak lanjut temuan BPK			85 %					Persentase tindak lanjut temuan BPK	85 %	
		Persentase tindak lanjut temuan BPKP			90 %					Persentase tindak lanjut temuan BPKP	90 %	
		Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten			90 %					Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten	90 %	
		Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi			90 %					Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	90 %	
6 01 02												
								3.560.268.025			3.439.049.200	
								2.421.883.826			2.191.414.500	
											933.963.900	

Ko de	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur		Target
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	Kab. Luwu, Belopa, Tampunila Radda	100 % 85 % 90 % 90 % 90 %	20 LHP 75 Laporan	75 Laporan	211.812.200 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	100 % 85 % 90 % 90 % 90 %	234.070.200	
6 01 02 2.01 03	Revisi Laporan Kinerja	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	Kab. Luwu, Belopa, Tampunila Radda	100 % 85 % 90 % 90 % 90 %	5 Laporan 75 Laporan	75 Laporan	164.015.313 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	100 % 85 % 90 % 90 % 90 %	172.000.000	
6 01 02 2.01 04	Revisi Laporan Keuangan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	Kab. Luwu, Belopa, Tampunila Radda	100 %	3 Laporan 75 Laporan	75 Laporan	409.350.363 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	344.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Persentase tindak lanjut temuan BPK	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Internal	Kab. Luwu, Belopa, Tampunisia Radda	85 %	18 Laporan	75 Laporan	697.759.974	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase tindak lanjut temuan BPK	85 %	205.671.550
		Persentase tindak lanjut temuan BPKP				90 %						Persentase tindak lanjut temuan BPKP	90 %	
		Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten				90 %						Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten	90 %	
		Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi				90 %						Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	90 %	
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti				100 %						Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	
6 01 02 2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Persentase tindak lanjut temuan BPK	Jumlah laporan hasil kerjasama pengawasan	Jumlah laporan hasil pengawasan Internal	Kab. Luwu, Belopa, Tampunisia Radda	100 %	3 Laporan	75 Laporan	38.941.709	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase tindak lanjut temuan BPK	100 %	87.345.700
		Persentase tindak lanjut temuan BPKP				85 %						Persentase tindak lanjut temuan BPKP	85 %	
		Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten				90 %						Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten	90 %	
		Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi				90 %						Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	90 %	
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti				100 %						Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan hasil pemeriksaan APP yang sudah ditindaklanjuti	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	100 %	20 Temuan	75 Laporan	154.905.369 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	214.363,156
		Persentase tindak lanjut temuan BPK				85 %					Persentase tindak lanjut temuan BPK	85 %		
		Persentase tindak lanjut temuan BPKP				90 %					Persentase tindak lanjut temuan BPKP	90 %		
		Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten				90 %					Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten	90 %		
		Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi				90 %					Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	90 %		
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								1.138.384.199				1.247.634.700	
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah tertuntut yang melakukan pengembalian kerugian negara	Jumlah laporan hasil pengawasan tertentu	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	100 %	20 Orang	57 Laporan	298.383.475 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	373.401,850
		Persentase tindak lanjut temuan BPK				85 %						Persentase tindak lanjut temuan BPK	85 %	
		Persentase tindak lanjut temuan BPKP				90 %						Persentase tindak lanjut temuan BPKP	90 %	
		Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten				90 %						Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten	90 %	
		Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi				90 %						Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	90 %	

6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan tertentu	Kab. Luwu, Belopa, Tampulua Radda	100 % 85 % 90 % 90 % 90 %	37 Laporan	57 Laporan	840.000.724	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat	100 % 85 % 90 % 90 % 90 %	874.232.850
6 01 03	POGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI												705.743.220
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan												55.869.422
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Dokumen kebijakan teknis dibidang pengawasan yang dirumuskan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang dirumuskan	Kab. Luwu, Belopa, Tampulua Radda	100 %	6 Dokumen	2 Kebijakan	55.869.422	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %	19.597.800
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi												649.873.798
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase objek pembinaan pendampingan dan asistensi	Kab. Luwu, Belopa, Tampulua Radda	100 %	5 Laporan	20 %	259.993.923	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %	135.902.300
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Jumlah laporan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase objek pembinaan pendampingan dan asistensi	Kab. Luwu, Belopa, Tampulua Radda	100 %	1 Laporan	20 %	62.079.094	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %	66.137.090
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	Persentase objek pembinaan pendampingan dan asistensi	Kab. Luwu, Belopa, Tampulua Radda	100 %	35 PD	20 %	276.539.811	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %	370.052.350

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Korupsi	pendampingan dan asistensi	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan	asistensi	Radda						Dana Alokasi Umum	perumusan kebijakan, pendampingan dan		
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Jumlah laporan pendampingan,asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Persentase objek pembinaan pendampingan dan asistensi	Kab. Luwu, Belopa, Tampulua Radda	100 %	1 Laporan	20 %	51.260.970	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %	78.907.500	
TOTAL										11.578.510.971				12.157.986.793

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Tahun Anggaran 2024 merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran dan kebijakan daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah Program Kerja Pengawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah sebagai pemilik fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa meningkatkan kualitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi resiko pada perangkat daerah dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajemen resiko. Manajemen resiko berasal dari program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah yang memiliki resiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis resiko yang diusulkan dalam suplemen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran audit kinerja dalam rangka menjaga sinkronisasi dan konsistensi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

V.1. Kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu ruang lingkup perencanaan daerah yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Rencana Kerja yang telah disusun oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dimaksudkan untuk memenuhi unsur-unsur diatas sehingga memenuhi kaidah aturan perundangan, prosedur perencanaan dan keinginan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sehingga fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu sebagai elemen pengawasan Pemerintahan dapat dirasakan manfaat dan hasilnya.

V.2. Rencana Tindak Lanjut.

- a. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan objek pemeriksaan dalam rangka percepatan penyelesaian temuan dan rekomendasi.
- b. Melakukan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindaklanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI/APIP dan pendampingan terhadap laporan keuangan, pemeriksaan/audit kinerja dan pemeriksaan operasional serta manajemen resiko terhadap seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu.
- c. Melakukan asistensi dan pembinaan terhadap 35 perangkat daerah.
- d. Membuka layanan klinik konsultasi dan pemberian advisory
- e. Bekerjasama dengan KPK-RI dan Badan Statistik dalam rangka Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas (SPI)
- f. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pengawasan, Sarana dan Prasarana dalam rangka mendukung tugas-tugas di bidang pengawasan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2024 yang memuat pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas dan penunjang untuk dilaksanakan pada tahun 2024 yang disesuaikan dengan RKPD Tahun 2024.

Diharapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang telah disusun dapat diimplementasikan dalam kegiatan pengawasan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 diharapkan dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengawasan secara konsisten.

Belopa, Juli 2023

INSPEKTUR,

ACHMAD AWWABIN, S.STP,M.Si

PKT. Pembina Utama Muda

NIP. 197801281996121002